



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu 12 Februari 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Ubah Mindset Lebih dari Sekadar Kota Penyangga

RKPD 2026 Fokus pada Lima Prioritas Utama

SIDOARJO - Lima prioritas utama masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Mulai penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Kemarin (11/2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo

menggelar forum konsultasi publik terkait RKPD 2026. Plt Bupati Sidoarjo Subandi memaparkan, visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2026 mengusung konsep "Sidoarjo Maju, Sejahtera, dan Berkarakter" yang berbasis kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, serta pembangunan berkelanjutan. Lima prioritas utama dalam RKPD 2026 meliputi penguatan SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran, pertumbuhan



RKPD Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur."

SUBANDI
Plt bupati Sidoarjo

ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan tahan bencana. "RKPD Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur," jelasnya. Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan beberapa masukan strategis bagi penyusunan RKPD 2026. Dia menyoroti empat fokus utama, yakni penanganan banjir melalui optimalisasi drainase dan regulasi

tata ruang, penguatan pengelolaan sampah berbasis konsep 3R (reduce, reuse, recycle), peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta optimalisasi layanan digital yang adaptif dengan era gen Z. Menurut dia, Kabupaten Sidoarjo harus mulai mengubah mindset dari sekadar kota penyangga menjadi kota yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dia mendorong Pemkab Sidoarjo untuk tidak bergantung pada APBD dalam pembangunan. (uzi/fal)

Subandi Paparkan Arah Pembangunan Sidoarjo 2026

Ketua DPRD Beri Beberapa Masukan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Plt Bupati Sidoarjo Subandi memaparkan arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026. Itu dilakukan saat Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Kantor Bappeda, Selasa (11/2).

Subandi menjelaskan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 adalah Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter dengan berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, dan berkelanjutan.

"RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur," tandas mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini. Dijelaskan Subandi, arah kebijakan itu yakni, pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Dua, pengentasan kemiskinan dan pemerlu (pihak-pihak yang memerlukan) pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara tepat sasaran dan bertahap.

Tiga, pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengelolaan potensi lokal, pertanian, perikanan, yang terintegrasi dengan potensi utama perdagangan dan industri.

Empat, tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, serta didukung kapasitas aparatur yang lincah. "Lima, infrastruktur pelayanan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana," bebernya.

"Perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan," cetus Abdillah Nasih.

Juga soal penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah. Juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. (sta/trus)



Subandi meneken berita acara Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, Selasa (11/2).

Plt Bupati Sidoarjo Subandi Sampaikan Arah Pembangunan 2026, Ketua DPRD Berikan Masukan

Media online Kharismasnews.id • Published 11/02/2025 • 962 Views

Last updated: 2025/02/11 at 9:56 PM



Sidoarjo, Kharismasnews.id - Pemkab Sidoarjo sudah merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Selasa (11/2) Bappeda Sidoarjo membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta merumuskan program-program prioritas yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Apa saja masukan DPRD Sidoarjo?

IKLAN ADVERTISEMENT

Advertisement for 'RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU' with text 'MENGUCAPKAN SELAMAT Natal 2024 & Tahun Baru 2025' and 'DESA SIDODADI'.

MENARA BTS SIMPANG: Ketua DPRD Dukung Sikap Tegas Pemkab Sidoarjo Bongkar Bangunan Tanpa Izin

"Normalnya semua bangunan harus dilengkapi dengan IMB, tidak terkecuali bangunan menara BTS itu. Kalau memang tidak ada izinnnya, ya harus disikapi tegas pihak eksekutif," kata H. Abdillah Nasih SM, Ketua DPRD Sidoarjo.

Feb 11, 2025 - 20:36



Bangunmen menara BTS di Desa Simpang yang diduga tanpa izin telah berdiri kokoh. (sumber: H. Abdillah Nasih SM, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo).

FOKUS: Tim gabungan saat melakukan pembersihan sungai pelayaran di Desa Tanjungari Kecamatan Taman.

RKPD 2026, DPRD Beri Masukan Prioritas Pembangunan

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo sudah merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Selasa (11/2) Bappeda Sidoarjo membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta merumuskan program-program prioritas yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Apa saja masukan DPRD Sidoarjo?

Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKN menyatakan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 adalah Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter dengan berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, dan berkelanjutan.

"RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur," jelasnya. Apa saja arah kebijakan pembangunan Sidoarjo? Satu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dua, pengentasan kemiskinan dan pemerlu (pihak-pihak yang memerlukan) pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara tepat sasaran dan bertahap.

Tiga, pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengelolaan potensi lokal, pertanian, perikanan, yang terintegrasi dengan potensi utama perdagangan dan industri. Empat, tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, serta didukung kapasitas aparatur yang lincah. "Lima, infrastruktur pelayan-

an yang ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana," papar Plt Bupati Sidoarjo Subandi. Forum konsultasi publik, lanjut Subandi, sangat penting. Forum ini merupakan salah satu sarana pemberdayaan masyarakat. Mereka bisa berperan dalam pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan lainnya.

Sebagai pimpinan daerah, Plt Bupati Subandi mengharapkan seluruh komponen dan pelaku pembangunan yang hadir dalam forum konsultasi publik itu berkenan memberikan sumbangah, pemikiran.

Sehingga, melalui forum komunikasi publik ini, perencanaan RKPD pada tahun 2026 dapat diakomodir. Aspirasi berbagai stakehodersakan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Juga menjawab permasalahan dan kebutuhan skala prioritas pada 2026.

Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih hadir sebagai narasumber bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo tersebut.

Abdillah Nasih menyampaikan Saran dan Masukan Legislatif dalam Penyusunan Rancangan Awal KPD Kabupaten Sidoarjo 2026. Menurut dia, ada sedikitnya empat fokus penting. Ada pula saran dan solusi tepatnya. • Loe



FOKUS: Tim gabungan saat melakukan pembersihan sungai pelayaran di Desa Tanjungari Kecamatan Taman.

CS Berita Online

Komisi C DPRD Dorong Kebijakan Terpadu Atasi Banjir dan Sampah

KOTA-Sidoarjo masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi saat musim hujan. Salah satu penyebab utama adalah sistem drainase yang kurang optimal serta pengelolaan sampah yang belum maksimal.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Zakaria Dimas Pratama, menilai bahwa permasalahan ini memerlukan kebijakan yang lebih sistematis, termasuk peningkatan anggaran untuk infrastruktur dan pengelolaan sampah.

"Anggaran pengelolaan sampah di Sidoarjo hanya 0,44 persen dari APBD, padahal timbulan sampah pada 2023 mencapai 313 ribu ton," ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Selasa (11/2).

Dimas menyebut bahwa sekitar 36 persen sampah tidak dikelola dengan baik, sehingga menumpuk di sungai dan menghambat aliran air. Rendahnya kesadaran

• Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ubah Mindset Lebih dari Sekadar Kota Penyangga

RKPD 2026 Fokus pada Lima Prioritas Utama

SIDOARJO - Lima prioritas utama masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Mulai penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Kemarin (11/2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo

menggelar forum konsultasi publik terkait RKPD 2026. Plt Bupati Sidoarjo Subandi memaparkan, visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo 2026 mengusung konsep "Sidoarjo Maju, Sejahtera, dan Berkarakter" yang berbasis kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, serta pembangunan berkelanjutan. Lima prioritas utama dalam RKPD 2026 meliputi penguatan SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran, pertumbuhan



RKPD Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur."

SUBANDI
Plt bupati Sidoarjo

ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan tahan bencana. "RKPD Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur," jelasnya.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan beberapa masukan strategis bagi penyusunan RKPD 2026. Dia menyoroti empat fokus utama, yakni penanganan banjir melalui optimalisasi drainase dan regulasi

tata ruang, penguatan pengelolaan sampah berbasis konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*), peningkatan sarana prasarana pendidikan, serta optimalisasi layanan digital yang adaptif dengan era gen Z.

Menurut dia, Kabupaten Sidoarjo harus mulai mengubah *mindset* dari sekadar kota penyangga menjadi kota yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dia mendorong Pemkab Sidoarjo untuk tidak bergantung pada APBD dalam pembangunan. (uzi/fal)

CS Dipindai dengan CamScanner



Subandi Paparkan Arah Pembangunan Sidoarjo 2026

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Ketua DPRD Beri Beberapa Masukan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Plt Bupati Sidoarjo Subandi memaparkan arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026. Itu dilakukan saat Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Kantor Bappeda, Selasa (11/2).

Subandi menjelaskan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 adalah Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter dengan berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, dan berkelanjutan.

"RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur," tandas mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.

Dijelaskan Subandi, arah kebijakan itu yakni, pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Dua, pengentasan kemiskinan dan pemerlu (pihak-pihak yang memerlukan) pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara tepat sasaran dan bertahap.

Tiga, pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengelolaan potensi lokal, pertanian, perikanan, yang terintegrasi dengan potensi utama perdagangan dan industri.

Empat, tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, serta didukung kapasitas aparatur yang lincah. "Lima, infrastruktur pelayanan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana," bebernya.

"Perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan," cetus Abdillah Nasih.

Juga soal penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah. Juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. **(sta/rus)**



Subandi meneken berita acara Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, Selasa (11/2).



Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Wakil Mendikdasmen saat kunjungan ke KB-TK Al Muslim Sidoarjo, Selasa (11/2).

Terapkan Nilai-nilai Karakter dengan Baik

Wakil Mendikdasmen Apresiasi KB-TK Al Muslim

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, memberikan apresiasi terhadap proses pembelajaran di KB-TK Al Muslim Sidoarjo.

Hal itu karena KB-TK Al Muslim telah menerapkan penanaman nilai-nilai karakter dengan baik seperti membuang sampah pada tempatnya secara terpilah dan mengajarkan tentang kemandirian.

"Tadi saya ngobrol dengerin anak-anak. Salah satu yang menarik, mereka ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu hal kecil tapi sangat fundamental dalam memban-

gun budaya hidup bersih dan tanggung jawab, itu tadi saya dengar sendiri dari anak-anak," cetusnya, Selasa (11/2).

Kunjungan Wakil Mendikdasmen ke KB-TK Al Muslim Sidoarjo ini dalam rangka meninjau penerapan pembelajaran di PAUD yang dianggap sebagai fondasi pendidikan untuk menuju Indonesia Emas.

"Kalau pendidikan di PAUD nya ini maksimal insyaallah kita akan bisa mencapai generasi emas di tahun 2045," tandas Fajar Riza Ul Haq.

Dalam kunjungan ini, Wakil Mendikdasmen disambut jajaran pimpinan Yayasan Al Muslim,

para guru, serta siswa-siswi yang turut menampilkan berbagai kreasi seni dan tarian.

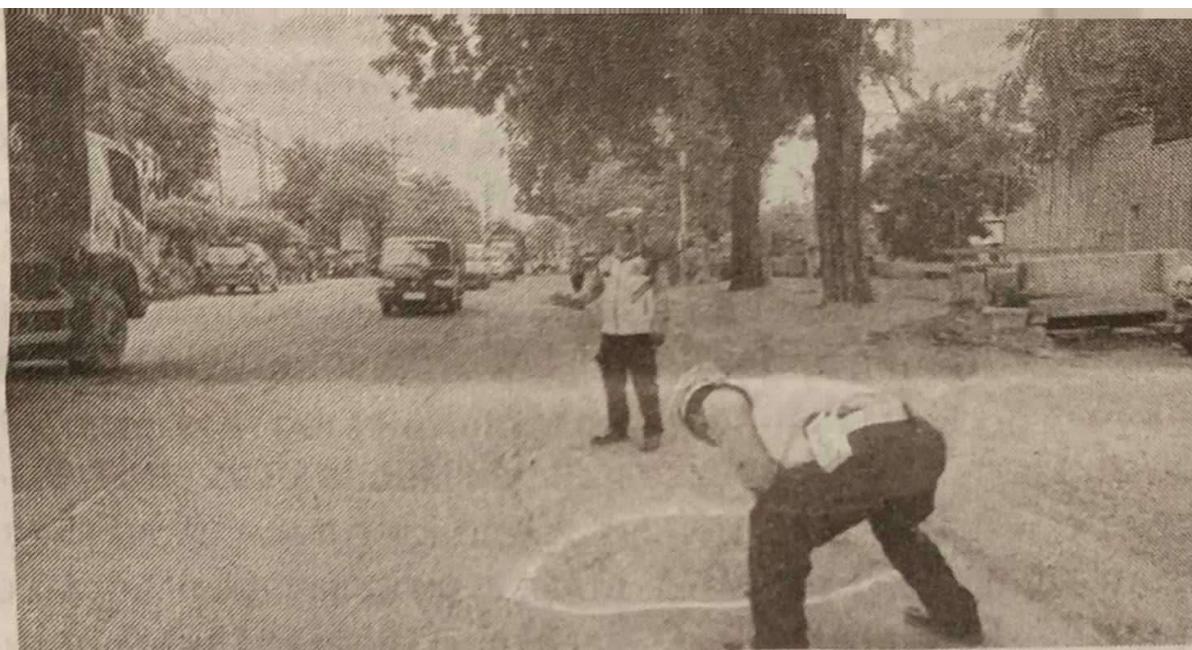
Saat memasuki kelase TK B-3, Wakil Mendikdasmen diajak bermain numerasi dan literasi yaitu "hujan kartu angka", menyebarkan kartu angka, kemudian siswa mengambil lalu mengurutkan dan menyebutkan angkanya.

Kepala KB-TK Al Muslim, Siti Aminah menyatakan berkaitan dengan pendidikan karakter, di Yayasan Al Muslim mulai KB hingga SMA sudah ditanamkan nilai-nilai karakter melalui six profil lulusan Al Muslim sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. **(sta/rus)**

CS Dipindai dengan CamScanner

**HARIAN
BANGSA**

Koran Warga, Jatiim



Anggota Polantas Polres Sidoarjo mengecat putih jalan berlubang.

Polisi Cat Putih Jalan Berlubang

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Peduli keselamatan pengendara. Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo memberikan tanda cat warna putih pada bagian jalan berlubang di wilayah Sidoarjo, Selasa (11/2/2025).

Aksi simpatik polisi tersebut dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2025 berkaitan untuk menekan faktor fatalitas berkendara. Seperti dapat diakibatkan kurangnya kewaspadaan pengendara terhadap jalan yang berlubang.

Selain kegiatan tersebut, anggota Satlantas Polresta Sidoarjo juga memasang banner himbauan pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan berkendara di sejumlah titik strategis.

Seperti disampaikan Kasi Humas Polresta Sidoarjo Iptu Tri Novi Handono, dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025, mulai 10 Februari sampai dengan 23 Februari 2025 pihaknya mengedepankan tindakan yang bersifat edukatif, humanis dan profesional.

“Masyarakat kami berikan edukasi pentingnya keselamatan berkendara dengan mematuhi peraturan lalu lintas, yang tentunya diiringi dengan upaya kepolisian secara humanis dan tetap profesional,” ujarnya. **(cat/rus)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SPMB Terapkan Sistem Domisili, Siswa SMA Bisa Sekolah di Luar Daerah



Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza.

M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

KOTA-Pemerintah resmi mengganti sistem zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan konsep domisili. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi siswa dalam memilih sekolah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Fajar Riza, mengungkapkan bahwa perubahan sistem ini dilakukan untuk pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

"Sistem domisili bukan sekadar perubahan istilah, tetapi merupakan penyempurnaan dari sistem zonasi agar lebih adil dan fleksibel," ujarnya

saat ditemui Radar Sidoarjo usai memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Selasa (11/2).

Perbedaan utama antara sistem zonasi dan domisili terletak pada cakupan wilayah penerimaan siswa. Jika sistem zonasi membatasi pendaftaran berdasarkan jarak dari sekolah, sistem domisili mempertimbangkan faktor yang lebih luas.

"Jadi, siswa tetap bisa memilih sekolah yang diinginkan sesuai dengan domisilinya," jelasnya.

SPMB sendiri menggantikan istilah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), meskipun pada dasar-

nya mekanismenya tetap sama. Empat jalur penerimaan masih diberlakukan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

"Untuk jenjang SMA, sistem ini menerapkan konsep rayonisasi, sehingga siswa bisa mendaftar ke sekolah di luar kabupaten, bahkan lintas provinsi," terang Fajar.

Sementara itu, untuk jenjang SD dan SMP, kebijakan domisili tetap mempertahankan keterkaitan dengan wilayah tempat tinggal, tetapi dengan beberapa penyesuaian agar lebih fleksibel dibandingkan aturan zonasi sebelumnya.

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner



SPMB Terapkan...

Fajar berharap, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas akses bagi siswa di berbagai daerah. Selain itu, sistem ini

juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan.

"Kami akan terus melakukan sosialisasi agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik," pungkasnya. (sai/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi C DPRD Dorong Kebijakan Terpadu Atasi Banjir dan Sampah



KOTA-Sidoarjo masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi saat musim hujan. Salah satu penyebab utama adalah sistem drainase yang kurang optimal serta pengelolaan sampah yang belum maksimal.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Zakaria Dimas Pratama, menilai bahwa permasalahan ini memerlukan kebijakan yang lebih sistematis, termasuk peningkatan anggaran untuk infrastruktur dan pengelolaan sampah.

"Anggaran pengelolaan sampah di Sidoarjo hanya 0,44 persen dari APBD, padahal timbulan sampah pada 2023 mencapai 313 ribu ton," ujarnya saat ditemui Radar Sidoarjo, Selasa (11/2).

Dimas menyebut bahwa sekitar 36 persen sampah tidak dikelola dengan baik, sehingga menumpuk di sungai dan menghambat aliran air. Rendahnya kesadaran

FOKUS: Tim gabungan saat melakukan pembersihan sungai pelayaran di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman.

M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner



Komisi C DPRD...

masyarakat dalam membuang sampah juga memperburuk kondisi tersebut.

"Sampah yang menumpuk inilah yang akhirnya memperburuk banjir, terutama saat musim hujan," jelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dimas mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki ekskavator guna

membersihkan sedimentasi dan sampah di sungai. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan kader lingkungan di tingkat RT yang bertugas mengawasi kebersihan lingkungan dan sungai.

"Penting untuk membangun budaya gotong royong yang lebih konsisten. Masyarakat harus mulai bergerak sejak dini, bukan hanya saat banjir sudah terjadi," tambahnya. (sai/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Plt Bupati



LOETFI/DUTA

Plt Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka Forum Konsultasi Publik tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sidoarjo 2026 di Bappeda Selasa (11/2/25)

Laksanakan Inpres Efisiensi

SIDOARJO - Plt Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 harus disambut dan dilaksanakan. Sebagai kepala daerah, dirinya harus menjalankan instruksi presiden tersebut. Dengan kebersamaan, Subandi mengajak semua pihak untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto itu dengan baik.

Subandi menyatakan Bupati Sidoarjo patuh pada perintah Presiden Prabowo dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

”Bagaimanapun, ini adalah instruksi presiden yang harus dijalankan oleh bupati,”

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

ungkap Plt Bupati Subandi saat membuka Forum Konsultasi Publik tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Sidoarjo 2026 di Bappeda Sidoarjo Selasa (11/2/25).

Sebagai pimpinan daerah, lanjut Subandi, dirinya juga meminta maaf. Seakan-akan, belum dilantik sudah membuat kebijakan yang tidak mengenakan pihak-pihak terkait. Misalnya, kegiatan yang biasanya diadakan di hotel seperti forum konsultasi publik itu.

Karena ada Inpres No. 1 Tahun 2025, tidak bisa lagi kegiatan forum konsultasi publik itu diadakan di hotel. Begitu pula kegiatan perjalanan dinas, pemotongan, dan refocusing lainnya.

Meski demikian, menurut Subandi, kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini masih lumayan. Refocusing saat ini baru 50 persen. Di zaman awal Presiden Jokowi, kegiatan di hotel-hotel juga dilarang. Para pemilik usaha hotel menjerit.

Subandi juga mengakui, kolega-kolega di DPRD Sidoarjo juga kaget. Di satu sisi, Perpres Nomor 53 Tahun 2023 berlaku lagi. (Perpres No. 53 Tahun 2023 mengatur tata cara perjalanan dinas anggota DPRD yang kembali ke biaya riil atau at cost).

Sekarang ada inpres lain yang mengatur efisiensi anggaran. Tapi, bagaimana lagi, ini adalah instruksi presiden yang harus dijalankan oleh bupati. Mau tidak mau mau harus dilaksanakan.

"Daripada tidak kita laksanakan, jelas nanti ada temuan BPK. Yang kena juga kita sendiri," ungkap Bupati Sidoarjo Terpilih 2025–2030 tersebut.

Begitu pula tentang Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan. Plt Bupati Sidoarjo Subandi juga menyatakan siap melaksanakan perintah Presiden Prabowo tersebut. ● Loe

RKPD 2026, DPRD Beri Masukan Prioritas Pembangunan

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo sudah merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Selasa (11/2/25) Bappeda Sidoarjo membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta merumuskan program-program prioritas yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Apa saja masukan DPRD Sidoarjo?

Plt Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn menyatakan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 adalah Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter dengan berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, dan berkelanjutan.

"RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur," jelasnya.

Apa saja arah kebijakan pembangunan Sidoarjo? Satu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dua, pengentasan kemiskinan dan pemerlu (pihak-pihak yang memerlukan) pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara tepat sasaran dan bertahap.

Tiga, pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengelolaan potensi lokal, pertanian, perikanan, yang terintegrasi dengan potensi utama perdagangan dan industri. Empat, tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, serta didukung kapasitas aparat yang lincah.

"Lima, infrastruktur pelayan-

an yang ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana," papar Plt Bupati Sidoarjo Subandi.

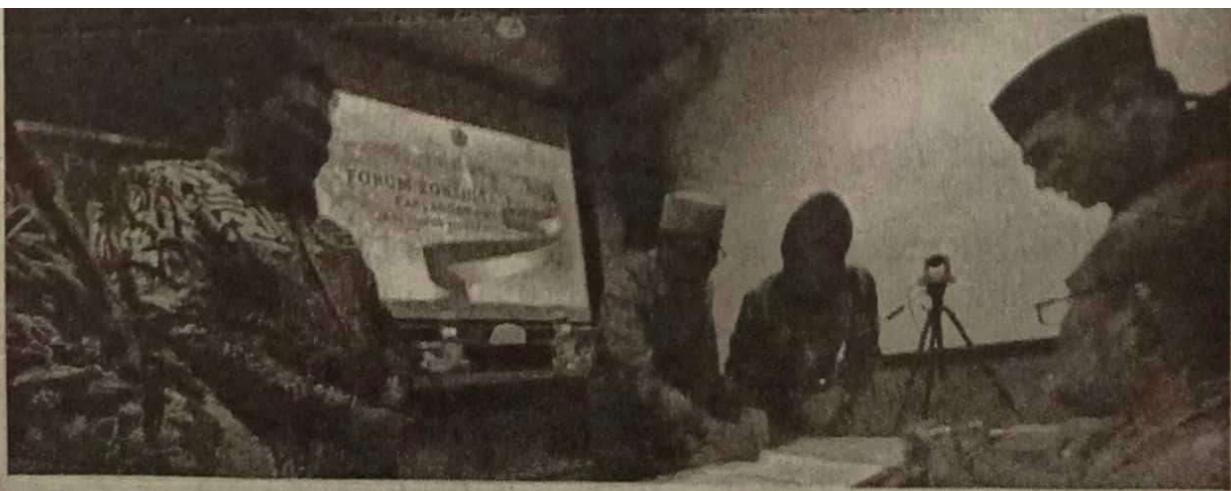
Forum konsultasi publik, lanjut Subandi, sangat penting. Forum ini merupakan salah satu sarana pemberdayaan masyarakat. Mereka bisa berperan dalam pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan lainnya.

Sebagai pimpinan daerah, Plt Bupati Subandi mengharapkan seluruh komponen dan pelaku pembangunan yang hadir dalam forum konsultasi publik itu berkenan memberikan sumbangsih, pemikiran.

Sehingga, melalui forum komunikasi publik ini, perencanaan RKPD pada tahun 2026 dapat diakomodir. Aspirasi berbagai stakeholders akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Juga menjawab permasalahan dan kebutuhan skala prioritas pada 2026.

Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih hadir sebagai narasumber bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo tersebut.

Abdillah Nasih menyampaikan Saran dan Masukan Legislatif dalam Penyusunan Rancangan Awal KPD Kabupaten Sidoarjo 2026. Menurut dia, ada sedikitnya empat fokus penting. Ada pula saran dan solusi tepatnya. ● Loe



LOETFI/DUTA

Forum komunikasi publik Pemkab Sidoarjo di Bappeda Selasa (11/2/25)(FT/)

CS Dipindai dengan CamScanner

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

MENARA BTS SIMPANG: Ketua DPRD Dukung Sikap Tegas Pemkab Sidoarjo Bongkar Bangunan Tanpa Izin

"Normatifnya semua bangunan harus dilengkapi dengan IMB, tidak terkecuali bangunan menara BTS itu. Kalau memang tidak ada izinnya, ya harus disikap tegas pihak eksekutif," kata H. Abdillah Nasih SM, Ketua DPRD Sidoarjo.

Feb 11, 2025 - 20:36



Bangunan menara BTS di Desa Simpang yang diduga tanpa izin telah berdiri kokoh. Insert: H. Abdillah Nasih SM, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.

NUSADAILY- SIDOARJO : Sudah sepatutnya Pemkab Sidoarjo bertindak tegas menyikapi bangunan yang didirikan tanpa dilengkapi perizinan. Termasuk bangunan tower transmisi seluler atau biasa disebut menara BTS (Base Transceiver Station) di Desa Simpang, Kec. Prambon.

Selain diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan aspek keselamatan serta gangguan lingkungan, keberadaan bangunan menara BTS ini sempat dikeluhkan masyarakat sekitarnya. Polemik bangunan tower yang berdiri kokoh dengan status 'Bodong' ini pun sempat menjadi polemik berkepanjangan karena sikap ambivalen dari Pemkab Sidoarjo.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih SM mengatakan pihaknya sangat mendukung sikap tegas yang harus diambil pihak eksekutif dalam menyikapi bangunan tak berizin. "Karena normatifnya semua bangunan harus dilengkapi dengan IMB. Tidak terkecuali bangunan menara BTS itu, kalau memang tidak ada izinnya, ya harus ada penindakan tegas dari pihak eksekutif," katanya, pada Selasa (11/2/2024) sore.

Lebih lanjut, Cak Nasih, sapaan pimpinan legislatif yang juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini berharap pihak pengusaha yang membangun tower itu tidak mengabaikan perizinan. "Soal itu kami segera bicarakan dengan pihak Komisi A dan C yang membidangi soal perizinan dan bangunan. Pada intinya setiap bangunan harus ada izinnya, dan jika hal itu diabaikan tentunya kami sangat mendukung Pemkab Sidoarjo bersikap tegas agar tidak menjadi preseden buruk," tegasnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan menara telekomunikasi yang dibangun diatas Tanah Kas Desa (TKD) Simpang itu masih tegak. Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo. Peringkat keluhan masyarakat sekitarnya hingga saat ini belum ada tindakan kongkret dari Pemkab Sidoarjo.

Ironisnya lagi, Plt Bupati Sidoarjo, H. Subandi pekan lalu sudah pernah memerintahkan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo untuk membongkar pembangunan menara BTS itu karena belum mengantongi izin sama sekali. Namun kenyataan hingga sekarang, upaya pembongkaran bangunan tower ini belum ada tanda-tanda segera dilaksanakan. "Saya berharap agar, apa yang diperintahkan oleh Bapak Plt Bupati Subandi segera dilaksanakan oleh anak buahnya. Jangan sampai ada prasangka buruk dan stigma negatif dari masyarakat, khususnya warga Simpang," kata Kolik, warga Desa Simpang. (*Cak ful)

Plt Bupati Sidoarjo Subandi Sampaikan Arah Pembangunan 2026, Ketua DPRD Berikan Masukan

Media online Kharismanews.id • Published 11/02/2025 • 962 Views

Last updated: 2025/02/11 at 9:56 PM

Share [f](#) [t](#) [e](#) [b](#)



Sidoarjo, Kharismanews.id – Pemkab Sidoarjo sudah merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Selasa (11/2) Bappeda Sidoarjo membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta merumuskan program-program prioritas yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Apa saja masukan DPRD Sidoarjo?

Plt Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn menyatakan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 adalah Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter dengan berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, dan berkelanjutan.

"RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur," jelasnya.

Apa saja arah kebijakan pembangunan Sidoarjo? Satu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Dua, pengentasan kemiskinan dan pemerlu (pihak-pihak yang memerlukan) pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara tepat sasaran dan bertahap.

Tiga, pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengelolaan potensi lokal, pertanian, perikanan, yang terintegrasi dengan potensi utama perdagangan dan industri. Empat, tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, serta didukung kapasitas aparatur yang lincah.

"Lima, infrastruktur pelayanan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana," papar Plt Bupati Sidoarjo Subandi.

Dalam forum konsultasi publik itu, Plt Bupati Subandi mengucapkan terima kasih atas kehadiran berbagai pihak. Baik perwakilan perguruan tinggi, pengusaha, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi perempuan, maupun tim penggerak PKK, dan perangkat daerah.

Forum konsultasi publik, lanjut Subandi, sangat penting. Forum ini merupakan salah satu sarana pemberdayaan masyarakat. Mereka bisa berperan dalam pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan lainnya. Sebagai pimpinan daerah, Plt Bupati Subandi mengharapkan seluruh komponen dan pelaku pembangunan yang hadir dalam forum konsultasi publik itu berkenan memberikan sumbangsih, pemikiran.

IKLAN ADVERTISEMENT





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sehingga, melalui forum komunikasi publik ini, perencanaan RKPD pada tahun 2026 dapat diakomodir. Aspirasi berbagai stakeholders akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Juga menjawab permasalahan dan kebutuhan skala prioritas pada 2026.

"Semoga forum konsultasi ini terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo," ungkap Bupati Sidoarjo Terpilih Periode 2025–2030 tersebut.

Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih hadir sebagai narasumber bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo tersebut.

Abdillah Nasih menyampaikan Saran dan Masukan Legislatif dalam Penyusunan Rancangan Awal KPD Kabupaten Sidoarjo 2026. Menurut dia, ada sedikitnya empat fokus penting. Ada pula saran dan solusi tepatnya. Seperti apa masukan DPRD Sidoarjo?

Pertama, penanganan banjir. Problem banjir ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas saluran drainase. Optimalisasi sistem pengendalian banjir. Penguatan regulasi sistem tata ruang.

"Dan, perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan," terang pria yang juga ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut.

Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah. Juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. Demi menciptakan lingkungan yang bersih berkelanjutan. Ketiga, memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang layak. Dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah yang rusak. Guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan yang baik.

Keempat, perhatian pada era digitalisasi dan penyesuaian Gen-Z. Di sini diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi Gen-Z dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

"Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses-proses perencanaan yang bottom up. Lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026," jelas Abdillah Nasih.

Selama 2025, lanjut dia, banyak PR (pekerjaan rumah) yang bisa di-push untuk diselesaikan pada 2026. Perlu dibuat daftar prioritas. Apa saja PR-PR itu. Misalnya, terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

"Jangan sampai perda yang digedok pada 18 Desember 2024 itu, tidak dapat diaplikasikan," tegas Nasih.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
Begitu pula program Satu Desa Satu Duta Wisata. Jangan hanya menjadi jargon. Harus muncul dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sidoarjo harus punya perhatian

khusus pada pariwisata. Apalagi, ada upaya memaksimalkan potensi wisata untuk sarana outdoor learning (ODL) siswa sekolah.

"Ke depan, bagaimana APBD terkait RKPD 2026, juga ada push di titik berat sektor pariwisata," tambahnya.

Abdillah Nasih mengajak masyarakat Kabupaten Sidoarjo tidak lagi punya mindset bahwa Sidoarjo adalah kota penyangga. Itu menimbulkan kesan inferior. Kabupaten Sidoarjo punya kemampuan untuk menjadi kota internasional. Seperti Kota Singapura di Singapura dan Kota Damaskus di Suriah.

"Sidoarjo sangat memungkinkan bisa sejajar dengan kota-kota di negara lain," seru Abdillah Nasih.

Dia berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan APBD dalam melaksanakan pembangunan. Sudah waktunya melirik kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan menjalin kemitraan, banyak PR-PR pembangunan yang bisa diselesaikan. Pendekatan pembangunan lebih berorientasi pada cooperation, collaboration, and participation (CCP).

"DPRD akan terus men-support selama itu memang untuk rakyat dan kemajuan Sidoarjo," tegas Abdillah Nasih. (Sund/Mas).

